

**ANALISIS PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN GURU SMA NEGERI
DAERAH TERPENCIL DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
DI PROPINSI JAMBI**

Sjarkawi; Murbojono, R; Rusdi, M; dan Wibowo, I. S.

*Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi 36361*

Abstrak

Abstract: Analysis of teachers needs and problems to implemented curriculum (KTSP) in the Public High Schools at the rural area in Jambi Province. The purpose of the research was to find the problems and the teachers needs to implemented curriculum (KTSP) of the Public High Schools at rural area in Jambi Province and determine some alternatives solution. The eight schools sample were selected. The data were collected through questionnaires and interviews. The result of analysis showed that the teachers problems to implemented curriculum were low competence teachers on academics, teaching skills, educations degree, trainning, insentives and salaries, facilities, schools climate, schools leadership, and parents contributeds. The teachers need were curriculum socialisation, teachers training, motivation, teaching facilities, good schools climate, incentives and salaries, and times to study duration.

Keywords : *implementasi. KTSP, SMA negeri terpencil.*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan, mengamanatkan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL. Kurikulum yang dimaksud disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Menurut Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 dan Nomor 6 Tahun 2007 bahwa sekolah sudah dapat menerapkan kurikulum dimaksud mulai tahun pelajaran 2006/2007. Pemerintah mengharapkan pada tahun 2008 semua sekolah sudah menggunakan kurikulum baru tersebut

Kurikulum yang ada sekarang dikembangkan dengan pendekatan desentralistik. Hal ini merupakan implikasi dari keseluruhan pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia yang didasarkan pada

berbagai perundangan yang telah ditetapkan, antara lain UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bab III Pembagian Urusan Pemerintahan Pasal 14 Ayat 1 yang menegaskan bahwa Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah/Kota antara lain pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Tuntutan utama dari pendekatan desentralistik adalah kemampuan untuk mengembangkan kurikulum yang harus menyebar dari tingkat pusat, daerah, sampai pada tingkat satuan pendidikan di sekolah. Kemampuan pengembangan dan melaksanakan kurikulum pada setiap tingkatan pendidikan bukan mengikuti jenjang birokrasi tetapi merata dan tidak memiliki perbedaan yang jauh antara pengembang kurikulum tingkat pusat, daerah maupun pada unit satuan pendidikan karena mereka memiliki fungsi masing-masing dalam skenario besar secara nasional. Kesenjangan yang selama ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya pemahaman dan kesiapan dalam implementasi kurikulum pada tingkat daerah dan satuan pendidikan sehingga pada saat

daerah diberi wewenang untuk mengembangkan kurikulum dan menerapkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan sumber daya pendidikan di masing-masing daerah.

Implementasi kurikulum terdiri atas tiga tahapan, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi (Mulyasa, 2003).

Pengembangan program yang dimaksud meliputi: pengembangan program tahunan, program semester, program modul, program mingguan dan harian, program remedial dan pengayaan, serta program bimbingan dan konseling.

Pelaksanaan Pembelajaran, Mengajar (teaching) dalam konteks KTSP adalah membelajarkan siswa. Oleh sebab itu keberhasilan proses pembelajaran tidak diukur dari sejauhmana siswa telah menguasai materi, tetapi sejauhmana siswa telah melakukan proses belajar. Dalam kegiatan pembelajaran guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Proses pembelajaran berpusat pada siswa. Materi yang dipelajari siswa tidak semata-mata ditentukan berdasarkan keinginan guru, tetapi memperhatikan perbedaan masing-masing siswa.

Pelaksanaan pembelajaran secara riil mencakup tiga tahap, pre tes, proses, dan post tes. (1) Pre tes, dilakukan untuk mengetahui: dari mana proses pembelajaran dimulai. (2) Proses atau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yakni bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan melalui strategi tertentu. (3) Post tes, adalah tes yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran berakhir.

Evaluasi Pembelajaran, karakteristik penilaian dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi, dapat dicermati dari: sistem penilaian, jenis tagihan, bentuk instrumen, serta kesahihan dan keandalan (Depdiknas, 2004: 25-30).

Perubahan kurikulum pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari inovasi dalam bidang pendidikan. Taba (dalam Zeis, 1979) menyatakannya sebagai "perubahan institusi", karena hal ini melibatkan perubahan nilai, personal sekolah, masyarakat, dan budaya. Hal ini menuntut masing-masing

sekolah melakukan inovasi organisasi. Inovasi organisasi, menurut Hanson (1985) terjadi apabila ada ide, teknologi, layanan, program, peralatan, atau metodologi baru yang diusulkan untuk digunakan di sekolah. Tujuannya untuk memperbaiki performansi dan pelayanan sekolah sehingga mampu menjadi lembaga yang lebih efektif dan efisien.

Kurikulum baru sebagai salah satu bentuk dari perubahan atau inovasi sekolah, maka dalam implementasinya menuntut adanya perubahan tingkah laku guru, sebagai pengguna kurikulum. Tanpa perubahan tingkah laku guru sesuai dengan petunjuk dalam kurikulum, tentu saja dapat dikatakan sekolah belum mampu mengimplementasikan kurikulum baru. Perubahan dikatakan telah terwujud, bahkan secara berangsur-angsur menuju kesempurnaan, apabila para pelaksana kurikulum tersebut telah memahami, menghayati, terampil mengamalkan dalam bentuk persepsi dan tingkah laku sehari-hari (Joni, 1984). Masalahnya adalah, apakah guru yang sudah terbiasa bertahun-tahun melakukan pembelajaran dengan cara-cara konvensional dapat dengan mudah melakukan perubahan? Gorton (1976) menegaskan kegagalan dalam implementasi kurikulum (baru) disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: kebiasaan, struktur birokrasi, kegagalan dalam insentif, kesulitan dalam penyesuaian, norma yang berlaku di masyarakat dan guru-guru, kegagalan dalam pemahaman, perbedaan pendapat, dan kurangnya keterampilan

Salah satu upaya penting bagi berhasilnya implementasi kurikulum, sebagai bentuk dari perubahan, adalah pembentukan sikap guru-guru terhadap Kurikulum. Oleh Rogers (1983) pembentukan sikap dinamakan dengan tahap persuasi. Dalam kaitan ini paling tidak ada dua aspek penting, sebagaimana dikemukakan oleh Zaltman dan Duncan (1977), yaitu: (1) keterbukaan personil sekolah terhadap perubahan atau pembaharuan, dan (2) persepsi dan keyakinan personil sekolah terhadap kesanggupan untuk mengimplementasikan perubahan dalam pembelajaran. Keterbukaan dalam hal ini merujuk pada pengetahuan dan keyakinan guru terhadap petunjuk dalam

Kurikulum, memahami, berhasrat sekali untuk mem-pertimbangkannya, dan merasa yakin bahwa pengimplementasiannya dapat meningkatkan keefektifan dan efisiensi pendidikan. Oleh karena itu dalam pengimplementasian perubahan, merupakan prasyarat perlunya dilakukan institusionalisasi terus menerus (Sergiovanni, 1987).

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa implementasi kurikulum, sebagai proses perubahan atau inovasi bidang pendidikan, akan berhasil apabila guru-guru memahami, menghayati, terampil mengamalkan dalam bentuk persepsi dan tingkah laku sehari-hari, serta guru-guru memiliki sikap positif terhadap kurikulum. Havelock (1973), menemukan beberapa hambatan dalam implementasi kurikulum baru, yaitu rendahnya kemampuan atau keterampilan guru; komitmen guru terhadap perubahan; sistem sekolah yang kurang mendukung; kurang tersedianya waktu, tenaga, dan dana; kompetisi tidak sehat antar kelompok yang ada dalam salah sekolah; dan banyaknya beban tugas guru.

Selain uraian di atas hasil evaluasi penerapan KTSP yang telah dilakukan BSNP (2006), diperoleh masukan, antara lain: Faktor pelaksana di lapangan atau guru, Faktor kemampuan sumberdaya manusia, Faktor pendukung pelaksanaannya, Faktor pemangku kepentingan (stakeholders), Faktor waktu dan hasil.

Stufflebeam dan Shinkfield (dalam Idris, 2005) mengajukan tiga kelompok faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu 1) Faktor rasional (context), 2) Faktor masukan (input) adalah berupa sumberdaya manusia (peserta didik, guru), 3) Faktor pelaksanaan (process), Faktor hasil (product).

Menurut Provus (dalam Fernandes, 1984) Faktor lain diduga turut mempengaruhi implementasi KTSP adalah kesenjangan (discrepancy), model evaluasi untuk melihat kesenjangan yang terjadi memiliki lima tahap yaitu desain, instalasi, proses, produk dan membandingkan. Baku pembandingan yang digunakan dalam evaluasi ini adalah Pedoman Pelaksanaan KTSP SD, SMP dan SMA tahun 2008 yang disusun oleh BSNP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kebijakan (policy research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Secara spesifik penelitian ini melakukan analisis terhadap masalah-masalah mendasar dalam rangka memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan untuk memecahkan masalah tersebut. Fokus penelitian adalah permasalahan dan kebutuhan guru dalam rangka mengimplementasikan KTSP di SMA pada daerah terpencil. Sampel sekolah diambil secara random, untuk menentukan satu sekolah yang mewakili wilayah (Kabupaten). Dari sepuluh kabupaten/kota ditetapkan delapan kabupaten saja. Kabupaten Kerinci dan Kota Jambi tidak dipilih sebagai sampel, karena kedua daerah tersebut tidak memiliki sekolah dalam katagori terpencil. Subjek penelitian adalah seluruh guru, kepala sekolah, dan siswa. Ketiga pihak tersebut sekaligus sebagai informan dalam penelitian ini.

Untuk pengumpulan data digunakan kuesioner tertutup dan terbuka yang diisi oleh guru-guru dari sekolah sampel. Selain kuesioner, untuk melengkapi dan mengembangkan analisis data dilakukan wawancara kepada beberapa pihak secara triangulatif, meliputi kepala sekolah, guru, dan siswa. Sebagai salah satu jenis penelitian kualitatif, proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 2003:84).

Dalam penelitian kebijakan muara akhirnya pada rekomendasi berupa alternatif-alternatif pemecahan masalah yang berguna bagi pengambilan keputusan. Agar diperoleh rekomendasi yang tepat berdasarkan data yang terkumpul, maka langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut: a) pengolahan data di lapangan, b) menggali permasalahan yang mempengaruhi implementasi KTSP, c) menemukan kebutuhan guru-guru agar implementasi KTSP efektif, d) mengembangkan pilihan-pilihan alternatif untuk: memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan KTSP,

memenuhi kebutuhan guru dalam rangka efektifitas implementasi KTSP, menganalisis kelayakan masing-masing cara tersebut dan merumuskan rekomendasi untuk diajukan kepada Pemerintah Provinsi. Agar diperoleh data dan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan maka digunakan cara (1) kredibilitas data, (2) transferabilitas, (3) dependabilitas, dan konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa tingkat pemahaman guru terhadap KTSP termasuk dalam katagori baik, skor rata-rata 4,1. Pemahaman guru yang dimaksud meliputi: 1) hakekat KTSP, 2) pendekatan pembelajaran, 3) penggunaan strategi pembelajaran, 4) materi, 5) alokasi waktu, dan 6) sumber belajar belajar

Sikap guru terhadap KTSP pada umumnya baik, skor rata-rata 4,1. Rata-rata 62% guru-guru pada SMA Negeri daerah terpencil tersebut menunjukkan sikap positif terhadap pemberlakuan KTSP. Sikap positif guru-guru tersebut ditunjukkan dengan: 1) dukungannya terhadap KTSP, 2) kesediaan melaksanakan kurikulum dengan senang hati, 3) memiliki harapan agar pendidikan lebih baik dari tahun sebelumnya, dan 4) memiliki rasa tanggungjawab tinggi terhadap pelaksanaan KTSP untuk peningkatan mutu pendidikan

Hasil pengumpulan data tentang implementasi KTSP di SMA Negeri daerah terpencil menunjukkan katagori cukup. Di antara guru-guru belum ada yang menyatakan telah melaksanakan KTSP dengan sangat baik. Bentuk implementasi KTSP yang telah dilaksanakan guru-guru meliputi: 1) penyusunan perangkat pembelajaran, 2) pelaksanaan pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa, 3) pemanfaatan multi sumber belajar, 4) variasi penggunaan media pembelajaran, 5) layanan bimbingan belajar, dan 6) evaluasi pembelajaran. Implementasi kurikulum termasuk dalam katagori cukup karena pelaksanaanya belum optimal.

Selanjutnya ditemukan beberapa faktor penghambat pelaksanaan KTSP di sekolah.

Faktor-faktor penghambat tersebut meliputi:

1) Kemampuan akademik guru kurang, 2) Keterampilan guru mengajar sesuai KTSP kurang, 3) Tingkat pendidikan guru tidak memadai, 4) Kurangnya pelatihan intensif tentang KTSP, 5) Kemauan guru untuk melaksanakan tugas sesuai KTSP, 6) Beban tugas dan pekerjaan yang harus dipikul guru, 7) Fasilitas yang tersedia di sekolah kurang mencukupi, 8) Lingkungan dan suasana hubungan kerja di sekolah, 9) Kepemimpinan kepala sekolah dan komite sekolah, 10) Jumlah murid per kelas terlalu banyak, 11) Waktu belajar yang tersedia kurang mencukupi, 11) Kurangnya penghargaan bagi guru berprestasi, 13) Gaji/insentif guru masih kecil, 14) Kurangnya dukungan sesama guru dan staf sekolah, 15) Kurangnya dukungan dan partisipasi orang tua murid. Diantara lima belas faktor penghambat tersebut yang dirasakan sebagai faktor yang kurang dominan adalah kepemimpinan kepala sekolah dan kondisi lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan guru-guru diperoleh informasi tentang kebutuhan guru agar KTSP dapat dilaksanakan dengan baik di sekolah-sekolah, meliputi: 1) kebutuhan pemahaman mendalam tentang KTSP, 2) pelatihan keterampilan mengajar sesuai dengan tuntutan KTSP, 3) kelengkapan sarana dan prasarana, suasana dan lingkungan sekolah, 4) dukungan manajemen sekolah, 5) peningkatan kesejahteraan guru.

Pembahasan

Faktor kemauan guru dinyatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kurikulum, sangat tepat sekali. Hal ini sejalan dengan pernyataan Levin & Nolan (1996), bahwa kemauan (*willingness*) merupakan energi yang ada dalam diri seseorang, mendorong melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, motivasi adalah sesuatu yang membuat orang tersebut gigih berusaha mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas dengan sukses. Gaynor dan De Vos (1989) yang dikutip oleh Scheerens (1992) mempertegas bahwa

pencapaian tujuan dan sikap ditentukan oleh tinggi rendahnya keinginan (kemauan) guru. (*"learning gap between student aptitude and achievement is the key factor in determining whether teachers' expectations are high or low"*). Dalam kenyataannya pada suatu sekolah, sering terjadi kesenjangan keinginan dengan prestasi siswa antar guru, oleh karena itu perlu adanya intervensi dari kepala sekolah dalam bentuk kebijakan sekolah. Oleh karena itu dengan intervensi kepala sekolah, diharapkan guru-guru dapat menyesuaikan harapannya terhadap prestasi belajar siswa sesuai kebijakan sekolah (Clauzet & Gaynor, 1982 dalam Scheerens, 1992).

Kemampuan dan keterampilan guru melaksanakan KTSP merupakan prasyarat bagi guru agar dapat melaksanakan kurikulum dengan baik. Hal ini sejalan dengan McAshan (1981: 45) " a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotoric behaviors". Finch & Crunkilton (1979) mengemukakan kompetensi sebagai penguasaan terhadap tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Beberapa ranah atau aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi, menurut Gordon (1988: 109), meliputi: (a) pengetahuan (knowledge), (b) pemahaman (understanding), (c) kemampuan (skill), (d) nilai (value), (e) sikap (attitude), (f) minat (interest).

Kecenderungan guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran sekedar untuk mengejar kelulusan UAN, menunjukkan bahwa orientasi pembelajaran hanya sebatas pada aspek kognitif saja. Keadaan tersebut dikritik oleh Cohn dan Rossmiller (1987), yang menyatakan bahwa keefektifan pendidikan hanya dikaitkan dengan pengetahuan kognitif untuk mengukur hasil pendidikan. Mereka mengakui kebanyakan studi lama selama mengkaitkan antara input dan output kognitif, selanjutnya dipakai untuk menentukan "sekolah yang efektif". Model

pembelajaran yang seperti itu dikenal dengan "Received Model (RM)", yang secara lebih sederhana melihat keefektifan sekolah dilihat dari hasil ujian (Landeghem et al., 2000).

Suasana lingkungan sekolah (iklim) menurut hasil-hasil penelitian menunjukkan menjadi faktor penghambat atau sekaligus pendukung pelaksanaan KTSP, didukung oleh Mike (dalam Sergiovanni, 1987), Owens (1987) Suyanto (1993), Sergiovanni (1987) iklim memiliki kapasitas merubah kebiasaan dan gaya kepemimpinan kepala sekolah, perilaku mengajar guru, dan proses belajar siswa, yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan ketercapaian tujuan. Perilaku kolegal (*collegial*), perilaku intim (*intimate*), dan lawannya perilaku lepas diri (*desengaged*). Indikator untuk: (a) perilaku kolegal yaitu: saling bantu dan kepedulian antar guru-guru dan staf; (b) perilaku intim yaitu: perilaku yang menunjukkan kuatnya dukungan dan kekohesifan hubungan sosial antar guru dan staf sekolah; atau sebaliknya (c) perilaku lepas diri yaitu: pemisahan diri, penentangan, dan kritis terhadap kelompok menimbulkan perilaku negatif.

Implementasi KTSP belum sepenuhnya sesuai dengan Depdiknas (2006), hendaknya memiliki karakteristik, sebagai berikut: 1) menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun kelompok; 2) berorientasi pada hasil belajar (*learning outcome*) dalam keberagaman; 3) penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi; sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif; 4) penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Nurhadi, dkk. (2003) menambahkan beberapa karakteristik KTSP sebagai berikut: menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan selesainya materi; kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa (normal, sedang, dan tinggi), sesuai dengan kondisi dan spesifikasi daerah; pembelajaran berpusat pada siswa; pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan beragam, dan

bersifat kontekstual; belajar sepanjang hayat (life long education).

Sistem penilaian dalam kurikulum berbasis kompetensi: berorientasi pada kompetensi hasil dan indikatornya; penilaian berbasis kelas menilai apa yang seharusnya dinilai, bukan apa yang diketahui siswa, meliputi: penampilan, kinerja, dan hasil karya; penilaian kontinyu dan komprehensif; alat penilaian: (1) tes kinerja: disiplin, kerjasama, kepemimpinan, dan inisiatif di kelas; (2) hasil karya siswa: laporan, gambar, bagan, tulisan, benda, karya seni, dll; (3) tes tertulis hasil ulangan; (4) proyek: kerja dalam tim; (5) portofolio: kumpulan karya siswa dalam satu semester/tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) pemahaman guru-guru SMA Negeri di daerah terpencil Propinsi Jambi terhadap KTSP baik; 2) sikap guru-guru terhadap KTSP baik atau mendukung; 3) implementasi KTSP termasuk dalam katagori cukup; 4) faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan KTSP meliputi: kemampuan akademik, keterampilan mengajar, tingkat pendidikan guru tidak memadai, kurangnya pelatihan intensif tentang KTSP, kemauan guru untuk melaksanakan tugas sesuai KTSP, beban tugas, fasilitas yang tersedia di sekolah kurang mencukupi, lingkungan dan suasana hubungan kerja, kepemimpinan kepala sekolah dan komite sekolah, jumlah murid per kelas terlalu banyak, waktu belajar yang tersedia kurang mencukupi, kurangnya penghargaan bagi guru berprestasi, gaji/insentif guru masih kecil, kurangnya dukungan sesama guru dan staf sekolah, kurangnya dukungan dan partisipasi orang tua murid.5) kebutuhan guru agar dapat mengimplementasikan KTSP dengan baik, meliputi: sosialisasi KTSP, pelatihan strategi pembelajaran yang berorientasi siswa aktif, pelatihan pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran, motivasi guru-guru agar melaksanakan kurikulum dengan baik di bawah bimbingan pengawas profesional,

mengurangi beban tugas guru yang bersifat non akademik, melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran, lingkungan atau iklim kerja yang kondusif, waktu belajar cukup termasuk untk kegiatan remedial, penghargaan pada guru berprestasi, menambah insentif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, kerjasama serta dukungan orangtua, dan kepemimpinan dan manajemen yang efektif dari kepala sekolah, Dinas Pendidikan, dan Komite Sekolah.

Saran

1) mengefektifkan kerja Tim Pengembang KTSP yang telah dibentuk di tiap Kabupaten/Kota sesuai pedoman Pola Pembinaan dan Implementasi KTSP BSNP; 2) melaksanakan sosialisasi KTSP secara intensif untuk seluruh guru melalui jalur MGMP/KKG, pelatihan, forum ilmiah, dan sebagainya; 3) meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar melalui pelatihan pembelajaran inovatif diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota bekerjasama dengan LPMP dan Perguruan Tinggi, menggunakan dana APBD; 4) menyelenggarakan pelatihan guru tentang pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan LPMP menggunakan dana APBD; 5) memotivasi guru-guru agar mau melaksanakan kurikulum dengan baik di bawah pembinaan Kepala Sekolah dan Pengawas; 6) Sekolah melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran secara bertahap, seperti: laboratorium (IPA, bahasa, komputer), media pembelajaran (tv, video, infocus, komputer), alat peraga (kit IPA, matematik, bahasa), perpustakaan sekolah (buku, majalah, jurnal), menggunakan dana APBD dan bantuan dari Depdiknas; 7) Kepala sekolah menciptakan lingkungan atau iklim kerja yang kondusif meliputi guru, staf, komite sekolah, stakeholders; 8) memberikan penghargaan yang sesuai kepada guru berprestasi, misalnya: memberi tambahan insentif, piagam penghargaan dari Kepala Dinas Pendidikan, pengakuan kinerja dari Kepala Sekolah, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- BSNP, 2006. Panduan Penyusunan KTSP Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: BSNP
- BSNP, 2007. Pola Pembinaan Implementasi KTSP. Jakarta: BSNP
- Cohn, E. & Rossmiller, R. A., 1987. Research on Effective Schools; Implication for less Development Countries. Dalam Fertig, M., 2000. Old Wine In New Bottles?. Researching Effective Schools in Developing Countries. School Effectiveness and School Improvement. An International Journal of Research , Policy, and Practice. Vol. 11 (3), h. 385-403.
- Depdiknas, 2008. Panduan Penyusunan KTSP. Jakarta: Ditjen Mandikdasmen Dirbin SMA.
- Depdiknas, 2007. Pedoman Pengembangan Silabus. Jakarta: Ditjen Mandikdasmen Dirbin SMA
- Dunne, D. W. & Delisio, E. R. 2001. Common Elements of Effective Schools. Education World (Online). <http://www.educationworld.com/admin/admin193.shtml>
- Finch, P. & Crunkilton, J. D. 1979. Curriculum Perspective and Practice. London: Longman.
- Gordon, T. J. 1988. Curriculum Development. Theory and Practice. New York: Hartcourt Brace Jovanovich.
- Gorton, R. A. 1976. School Administration. Challenge and Opportunity for Leadership. New York: Wm. C. Brown Company Publishers.
- Hanson, E. M. 1985. Educational Administration and Organization Behavior. Boston: Allyn & Bacon, Inc.
- Joni, T. R. 1984. Penelitian Pengembangan dalam Pembaharuan Pendidikan. Jakarta: Depdikbud, Ditjen Pendidikan, P2LPTK
- Landeghem, V. G. et al. 2002. The Effect of Schools and Classes on Noncognitive Outcomes. School Effectiveness and School Improvement. Vol 13 (4) h. 429-451.
- Levin, J. & Nolan, J. E., 1996. Principles of Classroom Management. A Professional Decision-Making Model. Boston: Allyn and Bacon.
- McAshan, R. C. 1981. Curriculum Development; Program Improvement. Columbus: Charles E. Merrill Publishers.
- Mulyasa, 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep Karakteristik, Implementasi, dan Inovasi. Jakarta: PT. Rosdakarya.
- Neagley, R. L. & Evans, N. D. 1980. Handbook for Effective Supervision of Instruction, 3rd Ed. Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall, Inc.
- Nurhadi; Yasin, B; & Senduk, A. G. 2003. Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Owens, R. G., 1987. Organizational Behavior in Education. 3rd Ed. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Rogers, E. M. 1983. Diffusion of Innovations. 3rd Ed. New York: The Free Press, A Division of Mcmillan Publishing, Co.
- Ryan, K, & Cooper, J. M. 1984. Those Who Can Teach. 4th Boston: Houghton Mifflin Company.
- Sanjaya, W. 2005. Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Prenada Media.
- Sheerens, J. 1992. Effective Schooling. Research, Theory, and Practice. New York: Cassell.
- Sergiovanni, T. J. 1987. The Principalship: A Reflective, Practice, Perspective. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Suyanto, A. 1993. Psikologi Umum. Cetakan ke sembilan. Jakarta PT Bumi Aksara
- Zais, R. S. 1976. Curriculum. Principles and Foundations. New York: Harper & Row Publishers

